PENYEMPURNAAN DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA LAKU

Improving the Training and Visit System)

Ahmad Sutarmadi*)

1. Pendahuluan

Selama hampir 10 tahun sejak tahun 1976 penyuluhan pertanian di Indonesia menerapkan sistem kerja Latihan dan Kunjungan. Selama waktu tersebut telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam tujuan meningkatkan produksi tanaman pangan terutama padi dan palawija.

Banyak negara yang sedang membangun melaksanakan penyuluhan pertanian dengan mengetrapkan sistem kerja LAKU, negara-negara tersebut tersebar dikawasan Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa. Direktorat Penyuluhan Tanaman Pangan nampaknya bertekad untuk menyempurnakan dan memantapkan sistem kerja LAKU agar sistem kerja LAKU yang sementara ini digunakan di Indonesia lebih mampu memberikan daya guna dan hasil guna penyuluhan pertanian.

2. Pengertian "Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan"

"Sistem kerja LAKU" didalam Penyuluhan Pertanian adalah suatu sistem penyuluhan pertanian yang mengandung kegiatan sebagai berikut:

- a. Kunjungan secara teratur oleh Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) kepada Petani.
- b. Didalam kunjungan itu penyuluhan secara teratur:
 - b.1. Melatih para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
 - b.2. Mengadakan identifikasi masalah yang dihadapi oleh petani.
 - b.3. Memberikan rekomendasi kepada petani didalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
 - b.4. Menyampaikan informasi pertanian kepada petani.
- c. Secara teratur Penyuluhan Pertanian Lapangan mendapatkan latihan untuk dapat mengikuti perkembangan pengetahuan sehingga menguasai pengetahuan mutahir dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani.

^{*)}Staf pengajar Fakultas Pertanian UGM.

Nampaknya sederhana sekali kegiatan dalam sistem kerja laku tersebut, yaitu PPL secara teratur mengunjungi petani dan PPL secara teratur mendapatkan latihan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan. Namun supaya sistem LAKU dapat bekerja efektif perlu dilakukan persiapan-persiapan yang matang. Persiapan antara lain:

- (1) Menyiapkan PPL yang profesional; orang yang berkualifikasi penyuluh bekerjanya hanya di bidang penyuluhan dan tidak dibenarkan mempunyai pekerjaan-pekerjaan sampingan yang dapat mengganggu kelancaran tugas-tugas utamanya.
- (2) Untuk menghadapi petani dalam melaksanakan penyuluhan, PPL perlu berbekal program penyuluhan yang berorientasi pada daerah dan pertanian setempat.
- (3) Pada kesempatan tatap muka dengan para petani para penyuluh hendaknya telah siap memecahkan masalah petani yang sebelumnya telah dipelajari oleh para penyuluh.
- (4) PPL perlu dibekali secara terus-menerus pengetahuan dan ketrampilan baru. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh PPM, PPS, ataupun instruktur dari luar sektor pertanian.

Dilain pihak para petani yang akan diberi penyuluhan perlu disiapkan dahulu dalam kelompok-kelompok, sehingga pada pelaksanaan penyuluhan PPL akan berkunjung kepada kelompok-kelompok tani. Kunjungan ini sudah termasuk dalam jadwal kunjungan, yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu bersama kelompok tani dalam lingkup wilayah kerjanya. Selanjutnya agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, PPL hendaknya berdomisili didalam wilayah kerjanya.

Dalam hubungan dengan sistem kerja LAKU ini, Benor dan Baxter¹⁾ mengetengahkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan sistem kerja LAKU:

(1) Professionalism

Semua penyuluh yang terkait dalam sistem kerja LAKU haruslah memiliki profesi penyuluh yang matang. Tugas pekerjaan penyuluhan tidak disampiri tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan penyuluhan.

(2) Single Line of Command

Bagi para penyuluh hendaknya hanya ada satu jalur perintah baik yang bersifat teknis maupun administratif.

¹⁾Daniel Benor and Michael Baxter 1984, Training and Visit Extension, A world Bank Publication, p.8.

(3) Concentration of effort

Tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh para penyuluh, baik untuk mengikuti latihan maupun untuk melaksanakan kunjungan haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan persiapan-persiapan yang baik.

(4) Time-bound work

Tugas-tugas kegiatan bagi para penyuluh hendaknya dilaksanakan mengikuti "ikatan waktu yang pasti" artinya terjadwal dengan waktuwaktu yang pasti dan teratur.

(5) Field and Farmer Orientation

Untuk memberikan pelayanan yang efektive kepada para petani dan juga untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani, maka para penyuluh maupun para penelitinya haruslah mempunyai pandangan yang cukup mengenai daerah dan petaninya.

(6) Regular and Continuous Training

Agar para penyuluh selalu siap membantu petani baik dalam diskusi maupun pemecahan masalah-masalahnya, para penyuluh haruslah secara teratur dan terus-menerus mendapatkan latihan-latihan. Dalam latihan ini akan diterima juga bahan-bahan/informasi baru dari para pelatihnya. Dengan demikian pengetahuan dan ketrampilan para penyuluh akan terus meningkat.

(7) Linkages with Research

Tak dapat disangkal bahwa penyuluhan yang efektif tergantung pada hubungan dengan penelitian. Langsung atau tidak langsung hubungan timbal balik antara penyuluhan dengan penelitian sangat diperlukan. Masalah-masalah dilapangan yang tidak dapat dipecahkan dan perlu ditangani para peneliti harus dapat segera tersalur kepusat-pusat penelitian, dan sebaliknya hasil-hasil penelitian yang sudah merupakan hasil yang sesuai atau yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi para petani dapat pula segera tersalur liwat penyuluhan ke petani.

3. Materi Penyuluhan

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa kegiatan usaha petani dan keluarganya mencakup sifat-sifat kegiatan yang lintas sektoral, multidimensional, terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan pertanian haruslah sejauh mungkin mencakup sifat-sifat tersebut. Materi penyuluhan tentunya perlu disiapkan sesuai dengan sifat kegiatan usaha tani.

Pada waktu-waktu yang lalu, materi penyuluhan umumnya masih tertuju penuh kepada segi-segi peningkatan produksi. Segi-segi pasca panen belumlah

secara jelas tercakup dalam materi-materi penyuluhan. Hal ini terbukti masih seringnya gabah petani ditolak oleh Dolog, dan ini menunjukkan kalau petani belum mampu memenuhi standar kualitas gabah yang diminta Dolog. Keadaan seperti ini juga menunjukkan perlunya para petani diberi motivasi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu gabahnya melalui penyuluhan pertanian. Selain dengan komoditi pertanian pangan, komoditi pertanian non pangan juga merupakan cabang usahatani. Cabang usahatani non pangan ini merupakan sumber pendapatan atau peningkatan pendapatan yang potensial bagi petani dan keluarganya. Sejauh ini materi penyuluhan yang berhubungan dengan peningkatan produksi komoditi pertanian non pangan dan sekaligus peningkatan pasca panen belumlah dicakup secara teratur dan berkesinambungan seperti halnya materi penyuluhan tanaman pangan.

4. Program Penyuluhan Terpadu

Adanya beberapa sifat kegiatan yang terpadu ditingkat petani menuntut terselanggaranya program penyuluhan pertanian terpadu. Selama ini telah banyak dilontarkan perlunya keterpaduan dalam penyuluhan pertanian, namun nampaknya masih sulit dilaksanakan. Penyusunan dan Pelaksanaan "Program Penyuluhan Terpadu" merupakan suatu sistem yang mewadahi seluruh kegiatan program sub-sub sektoral yang bersangkutan dengan sasaran penyuluhan.

Dengan demikian pelaksanaan program penyuluhan terpadu diharapkan dapat membantu:

- Mengatasi kemungkinan perencanaan dan pelaksanaan yang kurang _ terkendali dan terarah.
- (2) Mempertegas fungsi dan keterlibatan setiap sub sektor secara terpadu dalam program penyuluhan pertanian khususnya dan membangun pedesaan pada umumnya.
- (3) Meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan dan waktu pelaksanaan.
- (4) Membina kerjasama lintas sub sektoral secara baik di wilayah kerja penyuluhan.

Didalam pelaksanaan Pola Penyuluhan dengan sistem LAKU, sejak awal telah disadari perlunya pelaksanaan penyuluhan terdapau, sekalipun masih dalam taraf koordinasi, antara lain dengan dibentuknya forum Koordinasi Penyuluh Pertanian (FKPP) baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat Daerah Tingkat II dan bahkan ditingkat Wilayah Kerja BPP.

Namun sejauh ini FKPP tersebut belum dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Kiranya salah satu pilihan untuk mendekati pemecahan masalah ini adalah dengan memantapkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai tempat koordinasi dan integrasi penyuluhan pertanian dari berbagai sub sektor pertanian. Sementara ini BPP seolah-olah hanyalah

menjadi "dapur" dari program penyuluhan tanaman pangan. Untuk tidak sampai terjadi pembentukan berbagai Balai Penyuluhan, Peternakan, Perkebunan atau Perikanan secara terpisah-pisah kiranya perlu segera dilakukan pendekatan mengarah kepada usaha yang pengintegrasian didalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.

5. Penutup

Usaha penyempurnaan dan pemantapan pelaksanaan sistem LAKU hendaknya:

- (1) Mencakup peningkatan profesionalisme para penyuluh, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan secara teratur serta peningkatan dukungan fasilitas yang memadai sehingga dapat menambah motivasi kerja para penyuluh.
- (2) Peningkatan dan pengembangan lembaga-lembaga penyuluhan sebagai pendukung sistem kerja LAKU.
- (3) Dapat memecahkan masalah-masalah Pasca Panen dan Pemasaran yang dihadapi para petani.
- (4) Menjamin terlaksananya Program Penyuluhan Terpadu.

Pustaka

- Benor, Daniel and Michael Baxter 1984. Training and Visit Extension. Washington: World Bank.
- Bernadus Sugiarto, 1983. Pengelolaan Penyuluhan dengan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan di Kabupaten Bantul. Tesis Sarjana S-1 Fak. Pertanian UGM. (tidak diterbitkan).
- Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1977. Pedoman kerja dan Organisasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dengan Metoda Latihan dan Kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Herman Suwardi, 1979. "Memperbaiki Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU)" Dalam Agro-Ekonomika Tahun X no. 10, 1979.
- Kaman Rekam Andono, 1984. Masalah Intensitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Tanaman Pangan di Kabupaten Kulon Progo". Tesis Sarjana S-1 Fak. Pertanian UGM. 1984 (Tidak diterbitkan).
- Sumarno, 1983. Perkembangan Kelompok Tani Dalam Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Gunung Kidul. Tesis Sarjana S-1 Fak. Pertanian UGM. (Tidak diterbitkan).